

REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PEMBERDAYAAN

Ono Taryono

STIA LAN Bandung, Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung, Telp. 022-4220921

Email: simalem@yahoo.com.

Revitalizing Indonesian Agricultural Sector through Empowerment

The majority of Indonesians, especially those in rural areas, live dependently on agricultural sector. Agricultural sector indisputably caters for most employment opportunities in the country; however, it is hitherto unable to raise farmers' well-being. It stumbles upon several problems which are to be eliminated. The problems include farming land, capital access, technology, human resource capacity, infrastructure, market access and institutional management. Therefore, agricultural revitalization through empowerment becomes a prerequisite if the agricultural sector is to be elevated from its long-sustained deprivation.

Keywords: revitalizing, empowerment, farming land, capital access, technology, human resource capacity, infrastructure, market access, and institutional management.

A. Pendahuluan

Secara historis Indonesia adalah negara agraris mengingat sebagian besar penduduk negeri ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Seharusnya, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang makmur karena hasil pengelolaan produksi pertaniannya. Namun yang lebih sering terdengar adalah kabar-kabar miris di kalangan masyarakat petani yang tidak mampu makan sehari tiga kali, tidak mampu menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar, merasa stress karena sawah dan ladangnya diserang hama atau dilanda kekeringan, sampai kepada berita dimana petani beralih profesi menjadi penjahat atau mati gantung diri karena tidak tahan dengan himpitan beban hidup yang terus mendera.

Hal tersebut nampaknya sesuatu hal yang sangat ironis, dimana sektor pertanian yang seharusnya menjadi andalan, justru banyak membawa kesengsaraan. Persoalan ini muncul, nampaknya karena konsep pemberdayaan pelaku usaha pertanian belum mendapat porsi yang seharusnya.

Istilah *empowerment* atau pemberdayaan sudah tidak asing dalam benak dan telinga kita. Dalam kehidupan sehari-hari istilah ini banyak menghiasi tampilan media masa, termasuk juga bibir para pejabat yang tak henti-hentinya berbicara tentang pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan pada saat ini sedang menjadi jargon yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat.

Empowerment atau pemberdayaan berasal dari kata *power* yang artinya daya, kekuatan atau kekuasaan. Dengan demikian, menurut The Webster & Oxford English Dictionary *empowerment* memiliki arti memberikan kekuatan atau kekuasaan (*to give power or authority to*); memberikan kemampuan atau memampukan (*to give ability to or to enable*). Ife (1996) mendefinisikan *empowerment* atau pemberdayaan sebagai berikut: "*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*". Pemberdayaan merupakan upaya menyediakan masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan

ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi dalam dan merubah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan sektor pertanian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sektor pertanian sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi para pelaku sektor pertanian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, pemberdayaan sektor pertanian diharapkan akan lebih mampu meningkatkan kiprah dan kontribusi, baik dalam percaturan perekonomian lokal, nasional, maupun global.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, merujuk pada Kartasasmita (2003), pemberdayaan sektor pertanian dilakukan melalui tiga pilar. **Pertama**, penciptaan iklim yang memungkinkan potensi sektor pertanian untuk berkembang secara optimal (*enabling*) dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan memberikan keuntungan (*profitable*). **Kedua**, penguatan potensi dan daya yang dimiliki sektor pertanian agar mandiri dan *sustainable* (*strengthening*) dengan menyediakan berbagai input serta membuka berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat mengantarkan sektor pertanian agar menjadi berdaya. **Ketiga**, perlindungan (*protecting*) dari hambatan-hambatan struktural dan persaingan-persaingan yang tidak sehat.

Masih mengacu kepada pendapat Kartasasmita (2003), untuk memberdayakan sektor pertanian, diperlukan kebijakan yang secara langsung atau pun tidak langsung mengarah pada sasaran dengan memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung peningkatan keberdayaan sektor pertanian. Kebijakan

ini mencakup pengadaan sarana prasarana, penguatan kelembagaan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi para pelaku sektor pertanian, penciptaan ketertiban dan ketentraman, penciptaan iklim usaha tani dan stabilitas ekonomi, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya kebijakan yang mendukung sektor pertanian, diharapkan sektor pertanian akan bangkit dan memiliki peran vital dalam perekonomian bangsa.

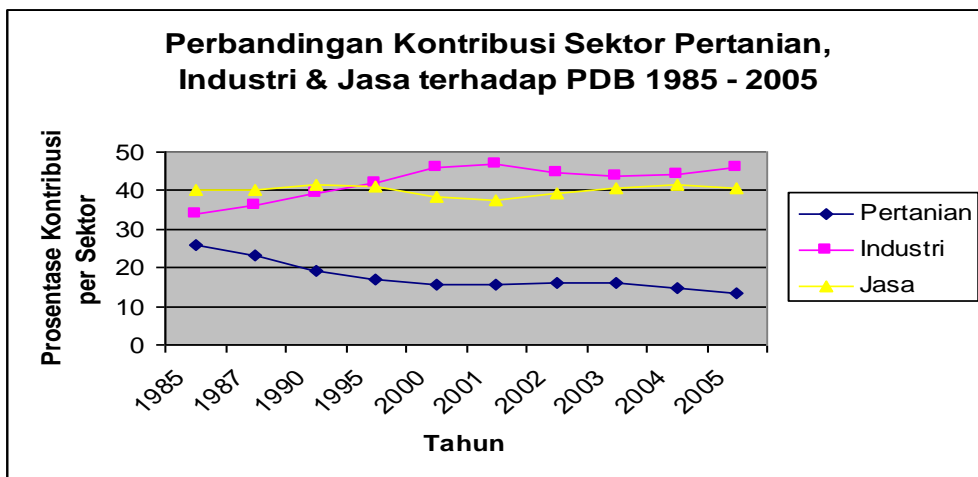
B. Sektor Pertanian: Kontribusi Ekonomi dan Perkembangannya

Pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini nampaknya belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar berada di daerah pedesaan yang hidupnya menggantungkan pada sektor pertanian. Para petani di daerah pedesaan sering dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya seperti akses kepada pendidikan, kesehatan dan air bersih. Disamping itu, tidak jarang pula keterpurukan para petani diperparah oleh ketidakberdayaan mereka menghadapi perilaku para tengkulak atau pedagang dan ketundukan mereka terhadap hambatan-hambatan struktural seperti pencabutan subsidi untuk sektor pertanian. Wajar jika kemudian banyak masyarakat petani yang beralih profesi atau migrasi ke daerah-daerah perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Walaupun pada akhirnya sebagian besar dari mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan (*poverty trap*) karena mereka tidak memiliki keahlian lain di samping bertani.

Terlepas dari permasalahan di atas, sejarah mencatat bahwa sektor pertanian

pernah menjadi primadona (*leading sector*) perekonomian Indonesia yang menyumbang lebih dari 70% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & penciptaan lapangan kerja yang luas. Namun, karena tidak ada visi pembangunan jangka panjang dalam sektor pertanian, sejarah gemilang tersebut seolah lenyap ditelan masa. Kondisi kondusif sektor pertanian pun berakhir tragis pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an dengan

terjadinya fase dekonstruktif sektor pertanian, di mana pada saat itu pemerintah melakukan proteksi berlebihan terhadap sektor industri. Sebagai akibatnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pun merosot tajam. Gambar 1 menunjukkan *trend* kontribusi sektor pertanian terus menurun dari tahun ke tahun dan peranan sektor industri dan jasa semakin mendominasi Pendapatan Domestik Bruto Indonesia.



Sumber: Key Indicators of Indonesia. ADB, 2000 – 2006 diolah.

GAMBAR 1
PERBANDINGAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN,
INDUSTRI, DAN JASA TERHADAP PDB 1985-2005

Secara kronologis, Samhadi (2005) menggambarkan perkembangan sektor pertanian sebagai berikut:

Periode revolusi (tahun 1945–1965). Pada masa ini terjadi nasionalisasi perkebunan eks pemerintah kolonial Belanda dan Jepang oleh pemimpin negara dalam rangka membangun sektor pertanian. Hingga akhir tahun 1950, kondisi pertanian belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Setelah dibentuknya Bimbingan Massal awal tahun 1960-an, produktivitas bidang pertanian mulai menunjukkan tahap peningkatan. Pada saat yang sama, muncul gerakan intensifikasi pertanian dimana para

peneliti dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan Demonstrasi Massal percontohan yang dilakukan di lahan pertanian wilayah pantai utara Jawa. Pada fase ini pula, mulai dikembangkan varietas unggul baru padi, gandum, jagung, dan biji-bijian.

Periode konsolidasi (tahun 1967–1978). Sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,39 per tahun, khususnya di subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Fase ini merupakan pancang pondasi yang kuat bagi pertumbuhan sektor pertanian pada tahun-tahun berikutnya dengan dikeluarkannya tiga kebijakan penting yaitu kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian. Untuk

mendukung pembangunan sektor pertanian, pemerintah memberikan stimulasi ekonomi dengan membangun berbagai infrastruktur vital seperti sarana irigasi, jalan & industri pendukung (semen & pupuk). Sistem penyuluhan melalui latihan dan visitasi digalakkan dan institusi perekonomian pedesaan seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dibenahi. Reformasi bidang paling spektakuler yang tidak terdapat di negara berkembang mana pun pada saat itu yaitu pemberian kredit pertanian bersubsidi hingga pelosok pedesaan.

Periode tumbuh tinggi (tahun 1978-1986). Sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan di atas 5,7%. Hal ini bisa dimengerti karena pemerintah menerapkan strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Dengan peranan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian, kinerja produksi pangan meningkat tajam. Program spektakuler Revolusi Hijau (*Green Revolution*) dan revolusi teknologi pangan berhasil mengantarkan bangsa ini menuju keberhasilan swasembada pangan pada 1984. Produktivitas meningkat sampai 4 kali. Kerja keras membangun sektor pertanian pun membuahkan hasil. Meski demikian, Revolusi Hijau juga memberikan dampak buruk karena sistem monokultur yang dipaksakan di semua daerah yang secara geografis tidak seragam menyebabkan kerusakan ekologi.

Periode dekonstruksi (tahun 1986-1997). Keberhasilan swasembada pangan pada fase tumbuh tinggi menyebabkan para ekonom dan pembuat kebijakan berasumsi bahwa perkembangan sektor pertanian akan terus bergulir dengan sendirinya. Kerja keras dan keberpihakan yang selama ini diberikan mulai luntur. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengalihkan pemihakan dari sektor pertanian ke sektor industri. Sebagai akibatnya basis pertanian mulai rapuh yang pada akhirnya menyebabkan

kontraksi pertumbuhan sektor pertanian menjadi 3,4%. Kemungkinan para ekonom dan pembuat kebijakan pada saat itu sudah terbuai teori pertumbuhan ala HB Chenery dan M. Syrquin (1975) di mana suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila negara tersebut sudah beralih dari pembangunan berbasis pertanian kepada pembangunan berbasis industri. Sektor pertanian dianggap tidak mendatangkan keuntungan (*benefit*) secepat sektor industri & investasi di perkotaan. Bahkan pemerintah menetapkan kebijakan pangan murah untuk menjaga agar harga-harga barang tetap murah dan terjangkau oleh para buruh untuk mendukung industrialisasi di perkotaan. Ini belum termasuk praktik-praktik tidak populer yang dilakukan sebagian pelaku ekonomi dengan aroma perburuan rente dan birokrasi yang sangat sentralistis. Semuanya ini berujung pada ambruknya kesejahteraan petani dan jatuhnya pembangunan berbasis pertanian di Indonesia.

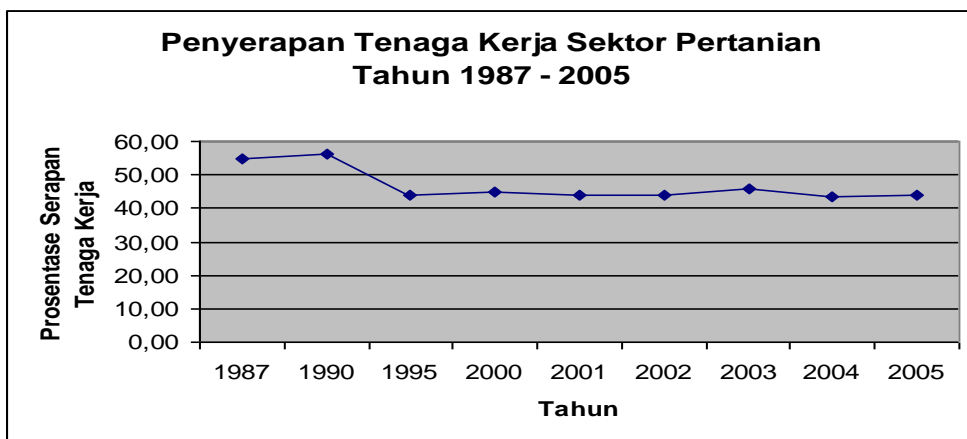
Periode krisis (tahun 1997-2000). Krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia mengakibatkan sektor pertanian yang sudah babak belur harus menyerap limpahan tenaga kerja perkotaan dan menjadi penyelamat perekonomian bangsa. Mahalnya harga input produksi impor ditambah kegagalan panen akibat kondisi alam yang kurang bersahabat membuat sektor pertanian kian terpuruk. Belum lagi, pencabutan subsidi pupuk dan invasi produk pangan dari luar seperti beras, baik datang melalui bantuan pangan, impor atau pun selundupan, yang menyerbu pasar domestik, semakin membuat masyarakat petani kelimpungan.

Periode transisi & desentralisasi (tahun 2001-sekarang). Periode ini semakin tidak jelas bagi para pelaku ekonomi dan bagi sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian yang harusnya dijadikan basis peningkatan kemandirian dan basis keunggulan komparatif dan kompetitif bak gayung tak

bersambut. Pembangunan sektor pertanian di daerah semakin terabaikan. Hanya kepala daerah tertentu saja yang peduli (*concerned*) dengan pembangunan berbasis pertanian, seperti Gubernur Gorontalo, H. Fadel Muhammad Al Haddar. Terbukti kepedulian pada pembangunan sektor pertanian (dalam hal ini produksi jagung) tersebut telah mengantarkan masyarakat Gorontalo ke jenjang kesejahteraan yang lebih baik. Produk jagung Gorontalo pada saat ini mulai banyak dilirik negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Berbagai kebijakan yang tidak pro-petani, sebagaimana diuraikan sebelumnya, jelas menyebabkan kinerja dan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto terus melorot. Pendapatan yang kecil di sektor pertanian masih harus di-*share* oleh besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan pada sektor ini. PDB yang hanya berkisar 15 persen harus dibagi-bagi oleh sekitar 45 persen tenaga kerja yang ada di negara ini. Dari sini kita bisa melihat gambaran kasar ketidakberdayaan masyarakat sektor pertanian yang sebagian besar berada di daerah pedesaan dibandingkan dengan

mereka yang bergerak di sektor industri dan jasa. Tingginya serapan tenaga kerja di sektor pertanian ini harusnya dijadikan indikator betapa pentingnya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Menyadari hal ini, mestinya produktivitas dan daya saing sektor pertanian kita perlu dibantu, kalau perlu dikontrol, agar terus meningkat sehingga masyarakat petani tidak menjadi rentan dalam menghadapi berbagai tantangan baik lokal maupun global. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Walaupun pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencanangkan revitalisasi bidang pertanian dalam ke pemerintahannya, impian para petani agar bisa menjadi lebih sejahtera hingga saat ini masih belum terwujud. Bahkan kini, dengan banyaknya bencana alam seperti kekeringan dan banjir ditambah tingkat inflasi yang terus melaju, kebutuhan akan impor pangan & produk pertanian semakin besar. Ironisnya kita sempat menjadi penerima bantuan pangan terbesar semasa krisis. Thailand & Vietnam pada tahun 1980-an pernah berguru pada pakar pertanian Indonesia, namun sekarang telah menyalip Sang Guru.



Sumber: Key Indicators of Indonesia. ADB, 2000 - 2006

GAMBAR 2
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 1987-2005

Kembali kalau kita runut sejarah ke belakang, pada awal abad ke-19 Indonesia pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua dunia setelah Kuba. Pada saat ini, negara kita menjadi importir gula terbesar kedua dunia. Dulu kita berhasil dalam swasembada beras. Kini Indonesia menjadi pengimpor terbesar di dunia (3,7 juta ton per tahun). Begitu juga produk-produk pertanian lainnya: gula (16 juta ton), kedelai (1,3 juta ton), gandum (4,5 juta ton), jagung (1,2 juta ton), sapi (450 ribu ekor), susu bubuk (140 ribu ton), garam (1,5 juta ton), singkong (0,85 juta ton), kacang tanah (100 ribu ton). Ketergantungan impor diperparah dengan menjamurnya jaringan supermarket internasional hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tahun 2002 impor buah-buahan mencapai 217 juta dollar AS, sayuran 111 juta, & tanaman hias 0,824 juta. Semua ini tentunya terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti sistem nilai, kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan teknologi, kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah.

Pada saat ini, pemerintah di bawah presiden SBY melakukan strategi revitalisasi pertanian. Masalahnya, banyak kalangan mempertanyakan apakah strategi ini merupakan strategi pembangunan yang benar-benar akan diimplementasikan atau hanya sekedar retorika politik saja. Arifin (2005) menyatakan sektor pertanian dapat dikatakan kembali vital atau menjadi basis pembangunan ekonomi jika berhasil menjadi pengganda pendapatan (*income multiplier*) dan pengganda tenaga kerja (*employment multiplier*). Pengganda pendapatan maksudnya sektor pertanian menghasilkan tambahan pendapatan bagi aktivitas ekonomi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, seperti agroindustri dan *off-farm* lainnya. Pengganda tenaga kerja maksudnya yaitu sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor

pertanian karena begitu tingginya keterkaitan sektor pertanian dengan industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menciptakan nilai tambah & meningkatkan sarana produksi & infrastruktur ekonomi lainnya. Kalau melihat kondisi saat ini, bisa dikatakan bahwa produktivitas sektor pertanian sangat rendah. Tingkat produktivitas pertanian saat ini jauh berbeda dibanding masa Revolusi Hijau dulu. Sementara, jumlah tenaga kerja yang tidak terserap sektor non-pertanian terus meningkat.

Di samping itu, sektor pertanian bisa dikatakan hidup kembali jika pendapatan petani telah meningkat dan kesejahteraannya membaik. Sebagaimana diketahui, pada saat ini terdapat 36 juta penduduk miskin, lebih dari 15 juta berada di pedesaan yang umumnya terlibat dengan sektor pertanian. Bisa dikatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian setelah 1990-an dan pascakrisis seakan serba salah. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat tidak menempatkan petani sebagai subyek yang berharga dan harus dilindungi dalam percaturan ekonomi global. Kebijakan ekonomi & upaya proteksi yang dimaksudkan melindungi petani seperti kebijakan pelarangan impor beras, masih jauh dari sasaran.

C. Masalah Krusial Sektor Pertanian

Ketidakberdayaan pertanian kita disebabkan oleh berbagai macam hambatan baik bersifat natural, kultural, maupun struktural. Hambatan natural dikarenakan kurang subur nya lahan, bencana alam dan sebagainya. Hambatan kultural disebabkan sikap masyarakat petani yang cenderung statis dan apatis terhadap perkembangan jaman. Hambatan struktural di antaranya disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro-petani. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini mencakup masalah lahan, permodalan, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran &

harga produk pertanian, infrastruktur, dan kelembagaan.

Masalah pertama yang dihadapi sektor pertanian adalah **lahan**. Rata-rata penguasaan tanah per orang hanya sekitar 0,2 hektar (Rahardjo, 2004). Dengan lahan sesempit ini, efisiensi produksi dan pendapatan total petani sulit ditingkatkan. Padahal, untuk mencapai skala ekonomi, seorang petani idealnya memiliki lahan garapan minimal 2 hektar. Belum lagi diperparah dengan konversi fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain seperti perumahan dan industrialisasi.

Masalah kedua yaitu **permodalan**. Modernisasi pertanian membutuhkan biaya produksi yang besar. Petani kita rata-rata miskin. Pembentukan modal harus didahului dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) antara produk pertanian dan produk barang & jasa di luar pertanian. Indeks Nilai Tukar Petani yaitu indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar petani harus ditingkatkan. Pada jaman Orde baru disediakan penyediaan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melalui perbankan, yaitu fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI) yang sekarang sudah dihapus. Masalah yang relevan dengan permodalan yaitu dicabutnya semua jenis subsidi, sehingga petani harus mengakses perbankan umum dengan tingkat bunga pasar.

Masalah ketiga yang dihadapi sektor pertanian yaitu **teknologi**. Orde Baru memperluas penggunaan teknologi modern melalui program Panca Usaha Tani. Hasilnya yaitu peningkatan produksi padi per hektar, walau rata-rata baru mencapai 4 ton (padahal negara lain sudah mencapai 8 ton). Tidak heran jika kita hingga saat ini mengimpor beras dari negara lain. Dari segi efisiensi, jelas kecenderungan rasio penerimaan petani dibanding pupuk semakin kecil. Harga beras rendah, sementara harga pupuk dan input produksi lainnya terus

meningkat. Pertanyaannya, mengapa Indonesia yang mempunyai bahan baku pupuk yang melimpah justru belum mampu memproduksi pupuk yang murah & berkualitas tinggi?

Masalah keempat adalah **sumber daya manusia (SDM)**. Upaya memberdayakan masyarakat petani tersandung pada kualitas SDM yang rendah, ditandai dengan mayoritas (lebih dari 90%) berpendidikan rendah, paling tinggi lulus SD. Banyak keluarga petani belum menyadari pentingnya investasi SDM melalui pendidikan (*human investment through education*). Misalnya, di daerah Pasundan masih ada sebagian keluarga petani yang beranggapan bahwa "*nyakolakeun budak mah sarua wae jeung miceun duit ka walungan*", artinya menyekolahkan anak sama dengan membuang uang ke selokan. Di wilayah pertanian pantai utara Jawa juga ada sebagian keluarga petani yang beranggapan, "*sekolah dhuwur-dhuwur, angger bae manggul pacul*", artinya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan mencangkul (menjadi petani) juga. Sebagai akibatnya, walaupun keluarga petani tersebut sebenarnya mampu mengakses pendidikan, mereka tidak mau mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

Masalah kelima yang banyak dihadapi para petani yaitu **pemasaran & harga produk pertanian**. Rendahnya pangsa pasar di pasaran dunia dan harga hasil-hasil pertanian yang cenderung turun & mengalami fluktuasi dimungkinkan terjadi karena tiga faktor: pertama, hasil pertanian tidak tahan lama & mudah rusak; kedua, bersifat serempak musiman sehingga menyebabkan pasokan berlimpah dan harga turun; dan ketiga, standarisasi internasional seperti *eco-labelling*. Di samping itu, belum ada *good will* para pejabat terkait untuk lebih memperkenalkan produk pertanian Indonesia ke luar negeri. Di Jepang misalnya, produk pertanian seperti beras, pisang, pepaya, dan mangga yang sering ditemui cenderung berasal dari Thailand

atau Filipina. Padahal, produk pertanian dari kedua negara tersebut tidak lebih baik dari produk pertanian Indonesia.

Masalah keenam yang dihadapi sektor pertanian adalah **infrastruktur**. Banyak daerah produktif yang tidak dapat mendistribusikan hasil pertaniannya keluar. Kasus-kasus di pemukiman transmigrasi di luar Jawa, misalnya. Walaupun daerah transmigran mampu menghasilkan produk pertanian, produk tersebut cenderung harus dikonsumsi sendiri, karena belum adanya jalur transportasi ke luar daerah tersebut. Kalau pun ada, kondisinya masih memprihatinkan dan sangat jauh dari pusat keramaian. Contoh lainnya, kasus di desa Girimukti, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa walaupun daerah tersebut termasuk daerah yang subur dan produktif akan hasil pertanian, namun hasil pertaniannya kalah bersaing dengan daerah lainnya. Hal ini bukan disebabkan mahal biaya produksi, melainkan mahal biaya transportasi di mana daerah tersebut dipisahkan oleh waduk Saguling. Masyarakat membutuhkan jembatan yang menghubungkan desa tersebut dengan daerah lainnya, bukan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang saat ini dilakukan (PR, 2 Januari 2007).

Masalah terakhir yang akan dibahas di sini yaitu **kelembagaan & intervensi**. Terdapat kelemahan kelembagaan yang berkaitan dengan usaha tani seperti KUD dimana fungsi yang diemban KUD tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan pengurus koperasi, kredit macet, dan masalah lainnya. Pemerintah Orde Baru giat sekali menyuarakan dan mempromosikan himpunan atau asosiasi para petani. Kini gaung asosiasi para petani nampaknya sudah memudar. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh dua faktor: pertama, kurang-minatnya generasi terkini dengan sektor pertanian karena dianggap kurang mampu

memberikan dampak ekonomi yang signifikan; kedua, kurang gencarnya upaya pemerintah untuk mempromosikan hal tersebut.

D.Strategi Pemberdayaan Sektor Pertanian

Berangkat dari permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, berbagai upaya perlu dilakukan untuk dicarikan solusinya dalam rangka memberdayakan sektor pertanian. Pemberdayaan di sektor pertanian ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kemandirian. Untuk itu, pertama-tama, perlu diupayakan akselerasi pembangunan pedesaan dengan fokus kepentingan golongan pendapatan rendah yang banyak didominasi para petani. Akselerasi pembangunan pedesaan dapat ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap sumber daya pembangunan pertanian yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan mengelola sumber daya tersebut. Dengan upaya itu semua, diharapkan produktivitas petani akan meningkat dengan menghasilkan produk-produk unggul sehingga pada akhirnya mampu menghadapi tantangan lokal dan persaingan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan eliminasi terhadap berbagai hambatan seperti yang sudah dikemukakan di atas.

Lahan pertanian. Masalah tanah tidak bisa hanya diselesaikan oleh para petani serta badan-badan atau lembaga terkait pertanahan dan pertanian. Seperti diketahui, banyak lahan pertanian yang subur terkonversi menjadi lahan perumahan, industri, perkantoran, dan fasilitas perkotaan lainnya sebagai konsekuensi logis dinamika pertumbuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Ini berakibat pada semakin menyempitnya lahan produktif pertanian. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tanah seringkali dilakukan secara tidak bijaksana dan hanya berorientasi jangka pendek. Misalnya, karena sempitnya

lapangan kerja di daerah pedesaan banyak lapisan tanah subur (*top soil*) yang dijadikan batu bata sehingga menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikannya kepada kondisi semula. Untuk mengatasi itu semua, dibutuhkan suatu solusi lintas-sektor yang menyangkut pengelolaan tata ruang untuk industrialisasi, perumahan, perkantoran, dan pembangunan fisik lainnya. Selain itu, diperlukan upaya migrasi bagi para petani yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit lahan garapan seperti melalui program transmigrasi.

Akses permodalan. Modernisasi sektor pertanian memerlukan modal yang besar. Sementara, petani rata-rata memiliki modal kecil. Dalam mengatasi ini para petani diharapkan dapat membentuk kelompok-kelompok untuk pemupukan modal atau bergabung dengan sektor formal seperti koperasi supaya lebih mudah dalam mengakses permodalan.

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur jelas memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, perlu perencanaan yang terarah kepada kebermanfaatannya, serta pengawasan dan perawatan (*maintenance*) yang intensif agar dapat berkesinambungan (*sustainable*). Jenis-jenis fasilitas dan infrastruktur tentunya disesuaikan dengan kebutuhan lokasi. Untuk mengakomodasi kepentingan dan pembangunan sektor pertanian di lokasi-lokasi yang terisolasi, diperlukan pembangunan jalan dan jembatan (sarana transportasi). Untuk daerah pertanian potensial yang rawan kekeringan seperti daerah Cirebon dan Indramayu, diperlukan pembangunan waduk dan kanal.

Teknologi. Di negara-negara maju seperti Jepang, terdapat alat pemanen yang langsung diterjunkan ke areal pesawahan. Mesin tersebut secara

otomatis melakukan proses pemanenan sehingga *output* yang dihasilkan berupa bulir-bulir gabah yang sudah bersih dari dedaunan atau potongan batang padi. Mesin bekerja sangat efektif dan hampir tidak ada bulir padi yang terbuang. Namun, karena harganya yang sangat mahal, teknologi semacam itu sudah barang tentu tidak bisa diterapkan di negara kita karena tidak ekonomis. Solusi yang tepat adalah dengan penerapan teknologi tepat guna dengan melakukan inovasi pada teknologi yang sudah ada dan dipergunakan masyarakat petani. Pengembangan teknologi juga diarahkan pada pengembangan produktivitas sektor pertanian yang selama ini masih tertinggal dibanding negara lain. Yang tak kalah pentingnya yaitu penggunaan teknologi pengolahan hasil pertanian sehingga produk pertanian bisa tahan lebih lama, tidak mudah rusak dan meningkat nilai tambahnya.

Pendidikan. Peningkatan taraf pendidikan (Wajib Belajar 9 tahun) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat petani yang perlu dilakukan. Sebagaimana diketahui, sebagian besar para petani di negeri kita berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Banyak studi yang menyimpulkan bahwa petani yang berpendidikan menghasilkan *output* lebih besar dibanding mereka yang tidak berpendidikan (Hendityo dalam Prijono & Pranarka, 1996). Untuk tujuan ini, investasi besar-besaran di bidang pendidikan perlu diarahkan ke pedesaan. Masyarakat petani perlu diberi kesadaran tentang pentingnya investasi sumber daya manusia dengan menyampaikan hal-hal seperti: tidak ada pejabat pemerintah, pemimpin dunia atau orang sukses yang sekarang hidup di kota yang tidak mengenyam pendidikan. Di negara-negara maju, orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya bisa dituntut ke pengadilan. Di negara Indonesia pun, setelah pendidikan dasar digratiskan, dapat menerapkan hal yang sama. Selain itu, kurikulum pendidikan hendaknya

mencakup muatan lokal (*locality-based curriculum*). Indonesia bisa belajar dari kasus Thailand, dimana sekolah dasar mengajarkan bagaimana melakukan budi daya pertanian mulai dari memilih bibit, menanam, merawat, hingga mengolah hasilnya. Produk budi daya tersebut pada akhirnya sebagian dijual dan sebagian lagi untuk konsumsi siswa di sekolah. Uang hasil penjualan dipergunakan untuk studi wisata, sedangkan hasil yang dikonsumsi di sekolah dapat meningkatkan tingkat gizi anak sekolah. Dengan penerapan pengetahuan & ketrampilan di bidang pertanian dari mulai tingkat sekolah dasar semacam itu, tidak mengherankan bila Thailand sekarang menjadi raksasa industri di sektor pertanian..

Pemberdayaan kelembagaan. Untuk meningkatkan keberdayaan para petani, kelembagaan terkait pertanian perlu direvitalisasi. Pada Koperasi Unit Desa (KUD), misalnya, perlu dilakukan pembinaan agar dapat berkembang menjadi organisasi modern dengan memberikan pelatihan, ketrampilan manajemen, kewirausahaan dan pengembangan wawasan tentang dinamika pembangunan ekonomi melalui bidang pertanian kepada para pengelolanya. Dalam rangka membantu tugas-tugas KUD agar lebih efisien & berhasil guna sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani miskin, kehadiran LSM yang menaruh perhatian pada petani miskin perlu didorong untuk menjadi mitra KUD. Organisasi lainnya seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dituntut untuk lebih independen, inovatif, dan memperhatikan nasib para anggotanya yang miskin. HKTI memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta

menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945. Di samping KUD dan HKTI, organisasi-organisasi tani lainnya juga perlu didukung agar mampu menjadi sarana untuk memperkuat petani dengan aksi saling memberdayakan (terutama aspek agribisnis petani, melalui organisasi petani atau badan usaha milik petani), saling membela (terutama pada aspek kebijakan dan mekanisme pasar yang tidak adil), dan saling membelajarkan kaum petani untuk menumbuhkan solidaritas, menghidupkan budaya demokrasi ekonomi dan politik, serta pengkaderan kepemimpinan petani.

Inovasi Sistem Usaha Tani. Ada kecenderungan kehidupan petani tidak dinamis dalam mengelola usaha pertaniannya. Perlu inovasi yang diarahkan agar lebih produktif melalui diversifikasi usaha kaum petani, baik dalam budidaya (*on-farm*) maupun *off-farm* (agroindustri dan jasa). Inovasi ini tidak akan berhasil jika petani tidak memiliki akses informasi, penguasaan teknologi dan akses pasar yang terus berubah.

Penguatan Akses Pasar. Petani nampaknya memerlukan kebijakan yang mengatur distribusi dan pemasaran produk pertanian antar wilayah baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional sehingga menciptakan keterpaduan antar wilayah produksi. Selain itu, kelompok tani didorong agar mampu menjadi produsen hasil usaha tani unggulan yang mampu mengakses pasar, menjalin jaringan dan kemitraan dengan pihak lain serta mampu mengendalikan pasar yang menguntungkan produsen.

E. Penutup

Sejauh ini, pemberdayaan dan pembangunan sektor pertanian cenderung bersifat retorik belaka dari jaman orde baru hingga sekarang ini. Bahkan

pemerintahan Yudhoyono yang pada waktu kampanye mengungkit revitalisasi sektor pertanian, belum melakukan gerakan yang nyata bermanfaat bagi pemberdayaan dan pembangunan sektor pertanian. Yang dirasakan para petani justru sebaliknya, semakin hari semakin terpuruk karena pendapatan yang mereka terima tidak sebanding dengan laju kenaikan harga pupuk dan biaya produksi lainnya. Nampaknya para petani, khususnya petani padi sulit mengenyam pendapatan yang layak akibat impor beras yang terus dilakukan pemerintah dengan alasan stabilisasi harga gabah.

Meskipun demikian, pemberdayaan dan pembangunan sektor pertanian harus terus dicanangkan dan dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan pemberdayaan sektor pertanian, para pelaku sektor pertanian diharapkan akan mencapai skala ekonomi yang layak dari hasil pengolahan pertaniannya dan dapat beranjak dari keterpurukannya.

Keberdayaan sektor pertanian sudah barang tentu akan menjadi salah satu pengungkit (*leverage*) bagi keberdayaan bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Untuk mewujudkan keberdayaan sektor pertanian, diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kebijakan dan program yang akomodatif terhadap pemberdayaan dan pembangunan sektor pertanian. Disamping itu, kebijakan dan program juga diarahkan untuk mengeliminasi segala permasalahan yang dihadapi dan membuka peluang yang lebih baik bagi para pelaku sektor pertanian. Meskipun, kebijakan dan program sudah dicanangkan, tanpa komitmen dari para pelaku pemberdaya, sulit nampaknya keberdayaan sektor pertanian akan terwujud, sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Terbukti hingga hari ini, masih sedikit pemerintah daerah yang menekankan kebijakan dan program pembangunannya pada pemberdayaan sektor pertanian.

Referensi

Buku

- Ife J. 1996. *Community Development: Creating Community Alternatives - Vision, Analysis, and Practice*. Longman.
- Kartasasmita G. 1996. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Kesenian Jakarta.
- Prijono OS. dan Pranarka AMW. 1996. *Pemberdayaan - Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Weiss J. 1995. *Economic Policy in Developing Countries: The Reform Agenda*. Great Britain: Prentice Hall.

Lain-lain

- Arifin B. *Implikasi Impor Beras*. Media Indonesia, edisi 29 Nopember 2005,

hal. 16.

- _____. *Jebakan Retorika Revitalisasi Pertanian*. Kompas, edisi 23 Mei 2005. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/23/utama/1767485.htm>
- Asian Development Bank (ADB). *Key Indicators of Indonesia*. 2000-2006. <http://www.adb.org/Documents/Books/Key.Indicators/2005/pdf/INO.pdf>
- Harian Pikiran Rakyat. *Jadi Desa Tertinggal Gara-gara Saguling*. Edisi Selasa, 2 Januari 2007. Hal 3.
- Hartati. *Sektor Pertanian Dianaktirikan*. Kompas, edisi 16 Agustus 2005. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/16/HUT/1963479.htm>
- Kartasasmita G. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Rakyat*. <http://www.ginandjar.com>.
- Pranowo G.. *Impor Beras dan Risiko WTO*.

Pikiran Rakyat, edisi 20 Januari 2006, hal. 24.

Rahardjo MD. *Pembangunan Pertanian di Persimpangan Jalan*. Fairtrade-Link.Org. 2004.
http://www.fairtrade-link.org/artikel.php?id_art=20

Sinukaban N. *Revitalisasi Pembangunan Pertanian*. Kompas, edisi 14 Juni 2005, hal. 5.

Wikipedia:

http://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan_Kerukunan_Tani_Indonesia